



RENCANA KERJA 2023



DISUSUN OELH :
**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempah dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian system perencanaan pembangunan daerah, Renja OPD sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2023 Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tahap akhir dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian akan dibahas bersama – sama dengan BAPELITBANG Kabupaten Padang Lawas Utara dan OPD lain dalam kegiatan Forum OPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan tersusunnya rancangan akhir Renja 2023 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program / kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 guna pencapaian target–target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam rancangan RKPD 2023.

Gunungtua, 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



DARMAN, S.Sos
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP 19710908 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	: i
DAFTAR ISI	: ii
DAFTAR TABEL	: iii
BAB I. PENDAHULUAN	: 1
1.1 Latar Belakang	: 2
1.2 Landasan Hukum	: 2
1.3 Maksud dan Tujuan	: 2
1.4 Sistematika Penulisan	: 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	: 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Ranstra OPD	: 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	: 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	: 13
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD	: 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	: 9
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	: 21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	: 21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	: 22
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	: 23
BAB IV. RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	: 25
BAB V. PENUTUP	: 30
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 5) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kemudian /badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam rencana strategis (renstra) /badan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merumuskan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi. Dalam menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Bappeda meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD. Kepala Bapelitbang mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.

Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menunjukkan prakiraan maju.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dibahas dalam forum internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bersama pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan program/kegiatan/sub-kegiatan prioritas pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 disusun sebagai bahan pembahasan dalam beberapa tahapan proses selanjutnya yang meliputi Rakortekrenbang, forum Perangkat Daerah, Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan tahap penyempurnaan/sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan program/kegiatan/sub-kegiatan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, sub-kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan/sub-kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, dan RPJPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun tujuannya adalah:

1. Pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan Tahun 2023;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2023;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirangkum dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan renja meliputi latar belakang perlunya penyusunan renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- Bab III : menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya mineral.
- Bab IV : menguraikan rencana kerja dan kerangka pendanaan perangkat Daerah
- Bab V : merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun ke Lima dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2019-2023. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang tertuang ke dalam 12 program dan 38 kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sebagaimana rencana, sesuai pencapaian target kinerja keluaran masing-masing program/kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 telah mewakili seluruh kegiatan yang ada. Semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ada program atau kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tercapainya sasaran kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan OPD lainnya, secara nyata diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara, yang diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023. (Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Padang Lawas Utara)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu

dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan Alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

A. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

- Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan yang memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan di badan kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal;
- Sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang ada;

- Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja;
- Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses; dan
- Perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Kondisi eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

- Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah;
- Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan sosial;
- Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat;
- Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat;
- Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Lawas Utara seperti daerah perbukitan, daerah terpencil dan daerah perbatasan dengan kabupaten lain yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat;

- Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945;
- Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum; dan
- Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

B. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam satu tahun ke depan adalah :

- Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2019-2023 dengan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adanya peluang dukungan dana dari APBD serta APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. (Tabel 2.2 pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara

Tabel 2.1
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	INDIKATOR	SPM/STNDR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah			16%	20%	16%	16%	32%	100%		100%	100%	100%	
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ormas			15%	20%	15%	20%	30%	67%		100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, dilakukan terlebih dahulu evaluasi, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan dan kebijakan pelaksanaan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Padang Lawas Utara yang dirumuskan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurang kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dilihat dari rendah tingkat penegakan hukum dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi dan penutupan jalan.
2. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi yang memunculkan akses – akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.
3. Meningkatnya Pengguna Narkoba seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan. Pengguna Narkoba yang marak ditemukan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah kasus pecandu narkoba. Praktek ini semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya. Perpindahan orang dan barang yang mulai mengalami peningkatan dari dan menuju Kabupaten Padang Lawas Utara, memunculkan berbagai dampak yang senantiasa harus diantisipasi.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. Program dan

kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi OPD.

Berikut ini adalah tabel review Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 : (Lampiran 2.1)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menciptakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang sehat dan bersih, tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam melaksanakannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahunnya selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam upaya meminimalisir kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat telah dibuat beberapa pos pengamanan dititik-titik tertentu yang kemungkinan besar terjadinya tindak kriminal. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan bisa meminimalisir tindak kriminal di lingkungan Masyarakat, agar terciptanya Masyarakat daerah yang aman, tertib, dan sejahtera.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh OPD;
5. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan
6. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan/sub-kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: (Tabel 2.4 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Padang Lawas Utara)

RANCANGAN RENJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp 6.761.274.339				Rp 7.437.401.773	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		7 kegiatan	Rp 2.996.841.182			7 kegiatan	Rp 3.296.525.300	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 sub kegiatan	Rp 10.000.000			2 sub kegiatan	Rp 11.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 5.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 5.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyusunan Rencana Strategis	Rencana Program Lima Tahunan	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum			Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah laporan akhir tahun	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum			Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Forum SKPD	Laporan	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum			Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Paluta	1 Laporan	Rp 5.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp 5.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Paluta	3 sub kegiatan	Rp 1.729.035.629	Dana Alokasi Umum		3 sub kegiatan	Rp 1.901.939.192	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		192 Orang/Bulan	Rp 1.719.035.629	Dana Alokasi Umum		192 Orang./Bulan	Rp 1.890.939.191,90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Paluta	1 Laporan	Rp 10.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp 11.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan aset/barang				Dana Alokasi Umum			Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Paluta	2 sub kegiatan	Rp -	Dana Alokasi Umum		2 sub kegiatan		
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.11	Bimtek Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundangan	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Paluta	6 sub kegiatan	Rp 298.079.752	Dana Alokasi Umum		6 sub kegiatan	Rp 327.887.727	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Paluta	2 Paket	Rp 88.901.500	Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp 97.791.650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah peralatan tulis	Kab.Paluta	21 Jenis	Rp 10.292.500	Dana Alokasi Umum		40 Jenis	Rp 11.321.750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Paluta	4 Jenis	Rp 78.609.000	Dana Alokasi Umum		10 Jenis	Rp 86.469.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab.Paluta	15 Paket	Rp 8.510.000	Dana Alokasi Umum		15 Paket	Rp 9.361.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Paluta	4 Paket	Rp 29.976.000	Dana Alokasi Umum		2 Paket	Rp 32.973.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Paluta	9 Paket	Rp 11.034.000	Dana Alokasi Umum		9 Paket	Rp 12.137.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Paluta	60 Dokumen	Rp 26.040.000	Dana Alokasi Umum		60 Dokumen	Rp 28.644.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Paluta	345 Laporan	Rp 133.618.252	Dana Alokasi Umum		345 Laporan	Rp 146.980.077,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	Kab.Paluta	155 Kali	Rp 15.500.000	Dana Alokasi Umum		40 Kali	Rp 17.050.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kab.Paluta	190 Kali	Rp 118.118.252	Dana Alokasi Umum		80 Kali berangkat	Rp 129.930.077	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Paluta	6 sub kegiatan	Rp 27.210.401	Dana Alokasi Umum		1 sub kegiatan	Rp 29.931.441	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab.Paluta	1 unit	Rp 1			1 unit	1,10	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab.Paluta	1 unit	Rp 21.700.000			2 unit	23.870.000,00	

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab.Paluta	1 unit	Rp 5.510.400	Dana Alokasi Umum			6.061.440,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum		6 unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Paluta	2 unit	Rp -			1 unit	-	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Paluta	1 unit	Rp -			1 unit	-	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paluta	3 sub kegiatan	Rp 753.195.400	Dana Alokasi Umum		3 sub kegiatan	Rp 828.514.940	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Paluta	12 Laporan	Rp 10.000.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	Rp 11.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab.Paluta	12 Laporan	Rp 48.960.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan	Rp 53.856.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab.Paluta	12 Laporan	Rp 694.235.400	Dana Alokasi Umum		12 laporan	Rp 763.658.940	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah petugas administrasi keuangan	Kab.Paluta	11 Orang	Rp 316.320.000	Dana Alokasi Umum		12 Orang	Rp 347.952.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas tenaga kebersihan	Kab.Paluta	2 Orang	Rp 24.000.000	Dana Alokasi Umum		2 Orang	Rp 26.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Tenaga Supir	Jumlah Petugas Tenaga Supir	Kab. Paluta	1 Orang	Rp 14.400.000			1 Orang	Rp 15.840.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis perkantoran	Kab.Paluta	28 Orang	Rp 336.000.000	Dana Alokasi Umum		28 Orang	Rp 369.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JKK/JKN Non PNS		Kab. Paluta	31 Orang	Rp 3.515.400			31 Orang	Rp 3.866.940	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paluta	3 sub kegiatan	Rp 179.320.000	Dana Alokasi Umum		3 sub kegiatan	Rp 197.252.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab.Paluta	4 unit	Rp 52.220.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit	Rp 57.442.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yg mempunyai izin dan pemeliharaan	Kab.Paluta	4 Unit	Rp 2.700.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit	Rp 2.970.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional	Kab.Paluta	4 Unit	Rp 49.520.000	Dana Alokasi Umum		4 Unit	Rp 54.472.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah mesin dan peralatan	Kab.Paluta	24 Unit	Rp 27.100.000	Dana Alokasi Umum		24	Rp 29.810.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan kantor	Kab.Paluta	1 Gedung	Rp 100.000.000	Dana Alokasi Umum		1	Rp 110.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE CAPAIAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab.Paluta	1 kegiatan	Rp 363.223.857	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	Rp 399.546.243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab.Paluta	2 sub kegiatan		Dana Alokasi Umum		2 sub kegiatan	Rp 399.546.243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Kab.Paluta	3 Dokumen	Rp 134.405.900	Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	Rp 147.846.490	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
IKU	Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembauran Kebangsaan	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 52.202.950	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 57.423.245	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKU	Pembinaan Mental ideologi Kebangsaan	Jumlah calon kepala desa yang dibina mentalnya	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 52.202.950	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 57.423.245	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Ulang Tahun Kabupaten Padang Lawas Utara	Terlaksananya kegiatan HUT Kab.Paluta	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 30.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kab.Paluta	700 Orang	Rp 228.817.957	Dana Alokasi Umum		700 Orang	Rp 251.699.753	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Kebangkitan Nasional	Terlaksananya kegiatan hari Kebangkitan Nasional	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 15.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Lahirnya Pancasila	Terlaksananya kegiatan hari lahirnya pancasila	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 15.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Pahlawan	Terlaksananya kegiatan hari pahlawan	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 15.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Kesadaran Nasional	Terlaksananya kegiatan hari Kesadaran Nasional	Kab.Paluta			Dana Alokasi Umum			Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT RI	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 138.817.957	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 152.699.753	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Bela Negara	Terlaksananya kegiatan hari bela negara	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 15.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Santri Nasional	Terlaksananya kegiatan hari santri Nasional	Kab.Paluta	1 Keg		Dana Alokasi Umum		1 Keg	Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Kesaktian Pancasila	Terlaksananya kegiatan hari Kesaktian Pancasila	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 15.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pembinaan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta yang dibina	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 15.000.000	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 16.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab.Paluta	1 kegiatan	Rp 1.364.260.000	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	Rp 1.500.686.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab.Paluta	2 sub kegiatan	Rp 1.364.260.000	Dana Alokasi Umum		2 sub kegiatan	Rp 1.500.686.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Kab.Paluta	15 Dokumen	Rp 1.364.260.000	Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	Rp 1.500.686.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKU	Pendidikan Pemilih Pemula	Jumlah Pemilih Pemula	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 70.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 77.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKU	Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 44.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKU	Netralitas Birokrasi dalam Pemilu	Meningkatkannya pemahaman PNS tentang netralitas PNS dalam Pemilu 2024	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 44.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	Hibah Partai politik	Terlaksananya penyaluran dana hibah kepada partai politik	Kab.Paluta	12 Dokumen	Rp 1.214.260.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	Rp 1.335.686.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab.Paluta	1 kegiatan	Rp 49.850.300	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	Rp 54.835.330	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab.Paluta	3 sub kegiatan	Rp 49.850.300	Dana Alokasi Umum		3 sub kegiatan	Rp 54.835.330	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 49.850.300	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 54.835.330	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Fokus Pembangunan	Sosialisasi tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 49.850.300	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 54.835.330	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Persentase capaian Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Kab.Paluta	1 kegiatan	Rp 235.199.600	Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	Rp 258.719.560	
8.01.05.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Kab.Paluta	3 sub kegiatan	Rp 235.199.600	Dana Alokasi Umum		3 sub kegiatan	Rp 258.719.560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Kab.Paluta	4 Dokumen	Rp 185.149.700	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	Rp 203.664.670	
Desa binaan	Seminar dan Lokakarya tentang Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Seminar dan Lokakarya tentang Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 35.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 38.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Fokus Pembangunan	Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 50.049.900	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 55.054.890	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKK	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya kegiatan sosialisasi nilai luhur budaya bangsa	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 50.049.900	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 55.054.890	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelatihan Ketahanan Ekonomi	Terbentuknya forum komunikasi	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp -	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Fokus Pembangunan	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba	Kab.Paluta	1 Dokumen	Rp 50.049.900	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 55.054.890	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Pembinaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Ummat Beragama	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Ummat Beragama	Kab.Paluta	100 orang	Rp	-		100 orang	Rp	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Tim Terpadu P4GN dan PN	Terlaksananya Pembentukan Tim Terpadu P4GN dan PN	Kab.Paluta	10 Orang	Rp	-		10 Orang	Rp	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pembinaan karya Seni dan Buudaya Sebagai Perekat Persatuan dan kesatuan Bangsa dalam karya Seni dan Budaya Sebagai Perekat	Terlaksananya kegiatan Pembinaan karya Seni dan Budaya Sebagai Perekat	Kab.Paluta	100 orang	Rp	-		100 orang	Rp	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Hari Anti Narkotika Internasional	Terlaksananya kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional	Kab.Paluta	100 orang	Rp	-		100 orang	Rp	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab.Paluta	100 orang	Rp	50.049.900		100 orang	Rp	55.054.890
Fokus Pembangunan	Forum Kelestarian Adat dan Budaya	Terbentuknya dan Terlaksananya peran dan fungsi Forum Kelestarian Adat dan Budaya	Kab.Paluta	100 orang	Rp	50.049.900		100 orang	Rp	55.054.890
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab.Paluta	1 kegiatan	Rp 1.751.899.400			1 kegiatan	Rp	1.927.089.340
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab.Paluta	2 sub kegiatan	Rp 1.751.899.400			2 sub kegiatan	Rp	1.927.089.340
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab.Paluta	400 orang	Rp	1.321.981.400		400 orang	Rp	1.454.179.540
IKU	Forum Komunikasi Sosial Politik dalam rangka Cipta Kondisi (sukses Pemilu Serentak 2024)	Terlaksananya kegiatan Komunikasi Sosial Politik dalam Cipta Kondisi di Kabupaten Padang Lawas Utara	Kab.Paluta	100 orang	Rp	60.594.100		100 orang	Rp	66.653.510
	hibah di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	terlaksananya hibah Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab.Paluta	100 orang	Rp	1.160.000.000		100 orang	Rp	1.276.000.000
IKK	Penanganan Gangguan Konflik Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	Terlaksananya Penanganan Gangguan Konflik Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara	Kab.Paluta	100 orang	Rp	50.807.400		100 orang	Rp	55.888.140
IKK	Sosialisasi Tentang Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penanganan Konflik Sosial	Kab.Paluta	100 orang	Rp	50.579.900		100 orang	Rp	55.637.890

Kode Akun	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab.Paluta	300 orang	Rp 429.918.000	Dana Alokasi Umum		300 orang	Rp 472.909.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Terlaksananya Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Kab.Paluta	100 orang	Rp 331.355.200	Dana Alokasi Umum		100 orang	Rp 364.490.720	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKK	Forum Dialog Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya Forum Dialog dengan Masyarakat	Kab.Paluta	100 Orang	Rp 50.038.100	Dana Alokasi Umum		100 Orang	Rp 55.041.910	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
IKK	Pemantauan Orang, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Orang, Tenaga Kerja dan Lembaga Asing	Kab.Paluta	100 orang	Rp 48.524.700	Dana Alokasi Umum		100 orang	Rp 53.377.170	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gunungtua, 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



DARMAN, S.Sos
PEMBINA TK IV/b
NIP 197109081994021001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Padang Lawas Utara dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Padang Lawas Utara agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal).

Sesuai dengan Peraturan Presiden no 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2021. Ada 7 prioritas nasional antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada prioritas ke-7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas meningkatkan keamanan dan kenyamanan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Membangun identitas, Karakter dan Talenta Bangsa bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya empat konsensus dasar nasional;
2. Meningkatkan Toleransi beragama, menjaga kerukunan umat beragama dan merajut keberagaman dengan meningkatkan sikap saling menghargai antar agama dan kelompok masyarakat Padang Lawas Utara yang heterogen;
3. Mendorong Penguatan Koordinasi dan Komunikasi terhadap seluruh *stakeholder* dalam menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Padang Lawas Utara demi terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara yang aman, tentram dan damai;
4. Memberdayakan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Memberdayakan organisasi masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
6. Meningkatkan kualitas demokrasi dengan memantapkan kondisi demokrasi dan sosial politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatnya penanganan penyelesaian kasus konflik SARA;
3. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi untuk menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal; dan

5. Meningkatnya kesadaran berpolitik dan berdemokrasi di kalangan masyarakat.

3.3 Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan dan sub-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka program yang akan dilakukan adalah: (Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara)

BAB IV

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang antara lain ;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati/walikota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi oleh lingkungan yang strategis. Hal ini dimaksud dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sangat tergantung pada karakteristik dari setiap daerah, dan perbedaan ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki dari setiap daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran yang sangat strategis.

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (*planning*), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (*action*), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa pendanaan, semua itu akan sia-sia.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan pagu indikatif Rp 9.999.400 - sub kegiatan antara lain :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Rp 4.999.700

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Rp 4.999.700

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan pagu indikatif : Rp 1.728.896.339 – sub kegiatan antara lain :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp 1.719.035.639

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : RP 9.860.700

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah : Rp 438.130.700 – sub kegiatan lain :

1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp 125.774.000

1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Rp 8.500.700

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp 29.976.000

1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp 11.034.000

1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Rp 24.400.000

- 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp 238.446.000
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif : Rp 41.248.200 – sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : Rp 35.600.000
 - 1.4.2. Pengadaan Mebel : Rp 5.648.200
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu indikatif : Rp 599.595.400 – sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Rp 10.000.000
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp 48.960.000
 - 1.5.3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp 540.635.400
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu indikatif : Rp 176.320.000 – sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : Rp 52.220.000
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Rp 27.100.000
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : Rp 100.000.000

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- 2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu indikatif : Rp 362.889.400 – sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan : Rp 134.256.100
 - 2.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan : Rp 228.633.300

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan pagu indikatif : Rp 2.364.249.400 – sub kegiatan sebagai berikut :

- 3.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ; Rp 2.364.249.400

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan pagu indikatif : Rp 109.850.100

- 4.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah : Rp 109.850.100

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

- 5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya dengan pagu indikatif : Rp 235.198.700 – sub kegiatan sebagai berikut :

- 5.1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah : Rp 185.149.000
- 5.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah : Rp 50.049.700

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- 6.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan pagu indikatif : Rp 691.896.700 – sub kegiatan sebagai berikut :

- 6.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : Rp
261.979.100

- 6.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : Rp
429.917.600

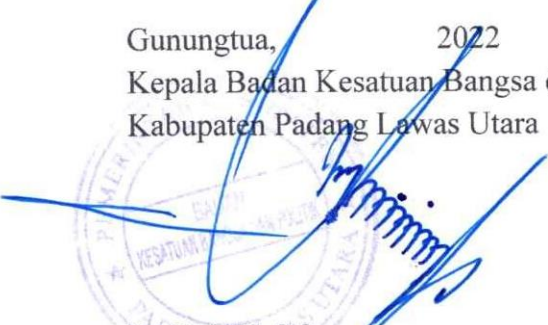
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja ini merupakan komitmen dan arah bagi seluruh aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan harus dijadikan sebagai pedoman dan gerak langkah dalam melaksanakan tugas untuk itu integritas dan profesional sumber daya manusia harus menjadi persyaratan utama.

Akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan karena rencana kerja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan kita sesuai dengan rancangan awal rencana kerja yang telah disusun ini. Semoga rancangan awal rencana kerja dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait.

Gunungtua, 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



DARMAN, S.Sos
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP 19710908 199402 1 001